

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1. LATAR BELAKANG.....	I.1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I.5
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I.7
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I.8
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	I.10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	II.1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II.1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II.27
2.1.3. Aspek Demografi.....	II.35
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II.39
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II.39
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat.....	II.53
2.2.3. Fokus Pendidikan	II.59
2.2.4. Fokus Kesehatan	II.64
2.2.5. Fokus Ketenagakerjaan	II.69
2.2.6. Fokus Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi.....	II.75
2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH	II.94
2.3.1. Pengeluaran Konsumsi Per Kapita.....	II.94
2.3.2. Nilai Tukar Petani.....	II.97
2.3.3. Produktivitas total daerah	II.100
2.3.4. Rasio Eksport Impor terhadap PDRB	II.101

2.3.5. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR	II.102
2.3.6. Rasio ketergantungan.....	II.104
2.3.7. Angka kriminalitas yang Tertangani.....	II.105
2.3.8. Daya Saing Investasi.....	II.106
2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM	II.108
2.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar.....	II.108
2.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar.....	II.152
2.4.3. Layanan Urusan Pilihan.....	II.184
2.5. ASPEK OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA.....	II.199
2.5.1. Kerangka Regulasi Otonomi Khusus Provinsi Papua.....	II.199
2.5.2. Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.....	II.203
2.5.3. Kewenangan Otonomi Khusus Provinsi Papua	II.207
2.5.4. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	II.208
2.5.5. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan.....	II.211
2.5.6. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Perekonomian Wilayah	II.212
2.5.7. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Tenaga Kerja dan Pengangguran	II.214
2.5.8. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia	II.216
2.5.9. Efektifitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus	II.217
2.6. ASPEK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	II.220
2.6.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II.220
2.6.2. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	II.247
2.6.3. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target.....	II.254
2.6.4. Indikator TPB Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target ..	II.262
2.6.5. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan/atau Tidak Ada Data ..	II.271
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III.1
3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2013-2017	III.2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III.2
3.1.2. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua	III.14
3.1.3. Neraca Daerah	III.17
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU.....	III.27
3.2.1. Proporsi Realisasi Belanja Daerah	III.30
3.2.2. Analisis Pembiayaan.....	III.35
3.3. KERANGKA PENDANAAN	III.37
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah.....	III.37
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan	III.42
3.3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	III.46
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV.1
4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV.1
4.1.1.Urusan Wajib Pelayanan Dasar	IV.1
4.1.2.Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	IV.11
4.1.3. Urusan Pilihan.....	IV.26
4.1.4. Penunjang Urusan Pemerintahan.....	IV.34
4.2. ISU-ISU STRATEGIS	IV.41

4.2.1. Isu Internasional	IV.41
4.2.2. Penelaahan RPJMN Tahun 2015-2019.....	IV.46
4.2.3. Penelaahan RPJPD Provinsi Papua 2005-2025.....	IV.49
4.2.4. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	IV.51
4.2.5. Isu-Isu Strategis Provinsi Papua	IV.59
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V.1
5.1. VISI JANGKA PANJANG PAPUA	V.1
5.2. VISI PEMBANGUNAN PERIODE 2018-2023	V.3
5.3. MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018-2023.....	V.7
5.3 TUJUAN DAN SASARAN	V.13
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI.1
6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH	VI.2
6.1.1 Prinsip dan Nilai Dasar Pembangunan	VI.2
6.1.2 Orientasi Pembangunan.....	VI.4
6.1.3. Pendekatan Pembangunan	VI.5
6.1.4 Strategi Pencapaian Sasaran	VI.6
6.2. ARAH KEBIJAKAN	VI.7
6.2.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan.....	VI.7
6.2.2 Arah Pembangunan Kewilayahannya	VI.27
6.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS.....	VI.47
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII.1
7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	VII.1
7.2. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN.....	VII.7
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII.1
BAB IX PENUTUP	IX.1
9.1. Kaidah Implementasi.....	IX.1
9.2. Pedoman Transisi.....	IX.2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kondisi Wilayah Administratif Provinsi Papua Tahun 2017	II.3
Tabel 2.2.	Luas Wilayah Laut dan Panjang Garis Pantai di Provinsi Papua.....	II.7
Tabel 2.3.	Kawasan Terluar di Provinsi Papua.....	II.7
Tabel 2.4.	Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan Wilayah Papua Tahun 2015-2019.....	II.9
Tabel 2.5.	Jumlah Desa Berkembang dan Desa Tertinggal di Provinsi Papua Tahun 2017*.....	II.11
Tabel 2.6.	Tingkat Kerawanan Bencana di Provinsi Papua Tahun 2013	II.12
Tabel 2.7.	Panjang Sungai dan Luas Daerah Tangkapan di Provinsi Papua.....	II.17
Tabel 2.8.	Jenis Penggunaan Lahan di Provinsi Papua Berdasarkan RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2023	II.21
Tabel 2.9.	Distribusi Penyebaran Tutupan Lahan Menurut Kelas Tutupan Lahan Dan Kabupaten/Kota Di Papua Tahun 2017.....	II.24
Tabel 2.10.	Potensi Mineral Logam dan Non Logam.....	II.32
Tabel 2.11.	Keadaan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2017	II.37
Tabel 2.12.	Struktur Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)	II.41
Gambar 2.19.	Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Berdasarkan Angka Deflator Tahun 2014-2017 (%).....	II.44
Tabel 2.13.	Ketimpangan Distribusi Pendapatan Tahun 2013-2016.....	II.50
Tabel 2.14.	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2013-2017	II.57
Tabel 2.15.	Indikator Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017	II.69
Tabel 2.16.	Pemenuhan Konsumsi Energi dan Protein Berdasarkan Kelompok Bahan Pangan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017	II.78
Tabel 2.17.	Komposisi PDRB Sektor Pertanian dan Perkebunan Menurut Harga Konstan 2010 Tahun 2013-2017 (milyar rupiah).....	II.82
Tabel 2.18.	Komposisi PDRB Sektor Pariwisata Provinsi Papua (milyar rupiah)	II.86
Tabel 2.19.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	II.89
Tabel 2.20.	Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Se Papua Tahun 2017 (%).....	II.92
Tabel 2.21.	Produktifitas Total Daerah per Tenaga Kerja (juta rupiah/orang)	II.100

Tabel 2.22.	Simpanan dan Kredit yang Disalurkan Sektor Perbankan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017	II.102
Tabel 2.23.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia (ribu orang)	II.104
Tabel 2.24.	Angka Partisipasi Pendidikan di Kabupaten/Kota Tahun 2017	II.111
Tabel 2.25.	Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2017	II.113
Tabel 2.26.	Angka Melanjutkan SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK	II.115
Tabel 2.27.	Jumlah Gedung Sekolah Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (unit)	II.115
Tabel 2.28.	Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua	II.117
Tabel 2.29.	Jumlah Murid di Provinsi Papua Tahun 2013-2017	II.118
Tabel 2.30.	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	II.119
Tabel 2.31.	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	II.119
Tabel 2.32.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tahun 2017	II.121
Tabel 2.33.	Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk	II.148
Tabel 2.34.	APM Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017	II.156
Tabel 2.35.	Data Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha)	II.159
Tabel 2.36.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Papua	II.160
Tabel 2.37.	Persentase Anak, Bayi dan Balita Berakte Kelahiran Tahun 2017	II.161
Tabel 2.38.	Persentase Penduduk dan Anak yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2017	II.162
Tabel 2.39.	Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua	II.166
Tabel 2.40.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	II.168
Tabel 2.41.	Rasio Akseptor KB	II.170
Tabel 2.42.	Jumlah PUS yang Tidak ber-KB	II.171
Tabel 2.43.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	II.175
Tabel 2.44.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Dari Perusahaan PMA Dan PMDN	II.176
Tabel 2.45.	Pemberdayaan Pemuda Provinsi Papua tahun 2013-2017	II.178
Tabel 2.46.	Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Papua tahun 2013-2017	II.178
Tabel 2.47.	Perkembangan Warisan Budaya Tak Benda Papua	II.180
Tabel 2.48.	Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Komoditas Utama Pertanian Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017	II.185
Tabel 2.49.	Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Komoditas Utama Perkebunan Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017	II.187
Tabel 2.50.	Produksi Kayu Hutan Menurut Jenisnya di Provinsi Papua (m ³)	II.188
Tabel 2.51.	Luas Areal Pengunaan Lahan Pertambangan (ha)	II.189
Tabel 2.52.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik PLN Tahun 2013-2017	II.192
Tabel 2.53.	Volume Ekspor dan Impor Menurut Negara Tujuan (ton)	II.193
Tabel 2.54.	Volume Ekspor dan Impor Menurut Pelabuhan (ton)	II.194

Tabel 2.55.	Volume dan Nilai Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Digit Provinsi Papua Tahun 2013 – 2016 (ton/US\$)	II.195
Tabel 2.56.	Nilai Ekspor-Import Provinsi Papua dan Indonesia (Juta US\$) Tahun 2013-2016 (US\$/%).....	II.195
Tabel 2.57.	Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan	II.196
Tabel 2.58.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan.....	II.197
Tabel 2.59.	Produksi Perikanan Tangkap (Ton).....	II.198
Tabel 2.60.	Perdasus Perintah Undang-Undang No. 21 Tahun 2001	II.199
Tabel 2.61.	Perdasi yang diamanatkan oleh UU No. 21 Tahun 2001	II.200
Tabel 2.62.	Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	II.210
Tabel 2.63.	Rata-Rata Orang Bekerja Dan Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II.215
Tabel 2.64.	Rata-Rata Percepatan IPM Di Provinsi Papua Dan Indonesia	II.217
Tabel 2.65.	Efektifitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Papua	II.217
Tabel 2.66.	Kualitas daya dukung penyediaan pangan di Provinsi Papua	II.220
Tabel 2.67.	Kondisi daya dukung penyediaan pangan per kabupaten	II.222
Tabel 2.68.	Tabel Kualitas daya dukung penyediaan pangan berdasar wilayah budaya.....	II.224
Tabel 2.69.	Keseimbangan Ketersediaan dan Kebutuhan Energi Pangan (kkal/tahun) .	II.228
Tabel 2.70.	Kualitas daya dukung penyediaan air Provinsi Papua	II.231
Tabel 2.71.	Kondisi daya dukung penyediaan air per kabupaten di Provinsi Papua	II.234
Tabel 2.72.	Kondisi daya dukung penyediaan air per wilayah budaya.....	II.235
Tabel 2.73.	Kondisi daya tampung per kabupaten dalam pemurnian air.....	II.237
Tabel 2.74.	Kondisi daya tampung pemurnian air per wilayah budaya	II.239
Tabel 2.75.	Keseimbangan Ketersediaan dan Kebutuhan Air (m ³ /detik)	II.242
Tabel 2.76.	Perhitungan luas guna lahan fungsi lindung	II.245
Tabel 2.77.	Perhitungan luas dan Proyeksi tutupan/penggunaan lahan	II.246
Tabel 2.78.	Ketercapaian Indikator Papua terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	II.248
Tabel 2.79.	Rekapitulasi Analisis Ketercapaian Indikator TPB.....	II.252
Tabel 2.80.	Rekapitulasi Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai Target.....	II.257
Tabel 2.81.	Gap Indikator yang Belum Tercapai	II.263
Tabel 2.82.	Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan atau Tidak Ada Data	II.272
Tabel 3.1	Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 -2017 (Rp juta).....	III.5
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017	III.7
Tabel 3.3	Perkembangan Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (Rp juta).....	III.10

Tabel 3.4	Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017.....	III.11
Tabel 3.5	Perkembangan Rencana dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 -2017 (Rp juta).....	III.13
Tabel 3.6.	Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua Tahun 2013-2017	III.16
Tabel 3.7.	Perkembangan Neraca Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017	III.19
Tabel 3.8.	Analisis Rasio Neraca Daerah Provinsi Papua	III.26
Tabel 3.9.	Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2017	III.30
Tabel 3.10.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun Anggaran 2013-2017	III.32
Tabel 3.11.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Papua Tahun 2013-2017	III.34
Tabel 3.12.	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Papua Tahun 2013-2017	III.35
Tabel 3.13.	Defisit Riil APBD Provinsi Papua Tahun 2013-2017	III.36
Tabel 3.14.	Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Provinsi Papua Tahun 2013-2017	III.36
Tabel 3.15.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023	III.40
Tabel 3.16.	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Provinsi Provinsi Papua Tahun 2018-2023	III.42
Tabel 3.17.	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Papua Tahun 2018-2023	III.43
Tabel 3.18.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2023	III.44
Tabel 3.19.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.....	III.45
Tabel 4.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan	IV.2
Tabel 4.2.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan	IV.4
Tabel 4.3.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV.6
Tabel 4.4.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....	IV.8
Tabel 4.5.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	IV.9
Tabel 4.6.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial	IV.11
Tabel 4.7.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IV.12
Tabel 4.8.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan.....	IV.12

Tabel 4.9.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	IV.13
Tabel 4.10.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV.15
Tabel 4.11.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	IV.16
Tabel 4.12.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	IV.17
Tabel 4.13.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan.....	IV.18
Tabel 4.14.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika	IV.19
Tabel 4.15.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	IV.19
Tabel 4.16.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan.....	IV.21
Tabel 4.17.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal Daerah	IV.22
Tabel 4.18.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja	IV.23
Tabel 4.19.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup	IV.23
Tabel 4.20.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan.....	IV.24
Tabel 4.21.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik.....	IV.24
Tabel 4.22.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan.....	IV.25
Tabel 4.23.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Persandian	IV.25
Tabel 4.24.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan	IV.26
Tabel 4.25.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian.....	IV.27
Tabel 4.26.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan	IV.28
Tabel 4.27.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kehutanan	IV.29
Tabel 4.28.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata.....	IV.30
Tabel 4.29.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan.....	IV.32
Tabel 4.30.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian.....	IV.33

Tabel 4.31.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan ESDM.....	IV.34
Tabel 4.32.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Pemerintahan.....	IV.35
Tabel 4.33.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penelitian, dan Pengembangan.....	IV.36
Tabel 4.34.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan.....	IV.36
Tabel 4.35.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keuangan	IV.38
Tabel 4.36.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengawasan.....	IV.39
Tabel 4.37.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan	IV.40
Tabel 4.38.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan dan Pelatihan.....	IV.41
Tabel 4.39	Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025	IV.47
Tabel 4.40.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Berbasis Wilayah Adat Di Provinsi PapuaIV.47	
Tabel 4.41.	Persandingan Isu Strategis dengan Indikator TPB yang Belum Tercapai.....	IV.53
Tabel 5.1.	Indikator Makro Pembangunan Tahun 2013-2018	V.13
Tabel 5.2.	Matriks Keselarasan Misi, Tujuan Sasaran Serta Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Papua Tahun 2018-2023	V.18
Tabel 6.1.	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2018-2023.....	VI.9
Tabel 6.2.	Target Kewilayahans.....	VI.29
Tabel 6.3.	Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah Provinsi Papua	VI.32
Tabel 6.4.	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	VI.33
Tabel 6.5.	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sarana Kesehatan dalam Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan di Papua	VI.34
Tabel 6.6.	Pengembangan Perekonomian Wilayah.....	VI.37
Tabel 6.7.	Pengembangan Wilayah Perbatasan	VI.45
Tabel 6.8.	Prioritas Program Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023VI.49	
Tabel 6.9.	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif.....	VI.74
Tabel 7.1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2023	VII.2
Tabel 7.2	Pengalokasian Pendanaan Program Prioritas Menurut Urusan Kewenangan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023	VII.2
Tabel 7.3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Papua Tahun 2019-2023.....	VII.8
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Tahun 2018-2023	VIII.2

Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2018- 2023.....	VIII.4
------------	--	--------

Gambar 1.1.Proses dan Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023.....	I.4
Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD Provinsi Papua Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I.7
Gambar 1.3. Keterhubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dengan Penganggaran	I.8
Gambar 2.51. Skor Pola Pangan Harapan di Indonesia dan Provinsi Papua	II.80
Gambar 2.52. Kondisi Ketahanan Pangan di Provinsi Papua.....	II.80
Gambar 2.53. Ketersediaan Cadangan Pangan di Provinsi Papua (ribu ton).....	II.81
Gambar 2.54. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)	II.83
Gambar 2.55. Nilai PDRB, Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)	II.84
Gambar 2.56. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)	II.85
Gambar 2.57. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)	II.87
Gambar 2.58. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)	II.88
Gambar 2.59. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	II.89
Gambar 2.60. Pengeluaran Per Kapita Riil di Provinsi Papua (juta rupiah)	II.95
Gambar 2.61. Struktur Pengeluaran Per Kapita di Provinsi Papua.....	II.95
Gambar 2.62. Komposisi Pengeluaran Per Kapita Papua Tahun 2017 (%)	II.96
Gambar 2.63. Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2013 dan 2017 (ribu rupiah)	II.97
Gambar 2.64. Nilai Tukar Petani di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)	II.98
Gambar 2.65. Nilai Tukar Petani di Indonesia pada Desember 2017 (%).....	II.99
Gambar 2.66. Nilai Tukar Petani dan Nelayan Provinsi Papua (%).....	II.99
Gambar 2.67. Net Ekspor Daerah dan Rasionya Terhadap PDRB	II.101
Gambar 2.68. Penyaluran Kredit Pada UMKM di Provinsi Papua.....	II.103
Gambar 2.69. Proyeksi Bonus Demografi di Provinsi Papua	II.105
Gambar 2.70. Penyelesaian Kejahatan di Provinsi Papua dan Indonesia (%).....	II.106
Gambar 2.71. Daya Saing Investasi Berdasarkan ICOR Tahun 2014 dan 2017	II.107
Gambar 2.72. Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua	II.109

Gambar 2.73.	Angka Partisipasi Pendidikan di Provinsi Papua	II.110
Gambar 2.74.	Jumlah Sekolah pendidikan SD, SMP dan SMA Tahun 2017	II.116
Gambar 2.75.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun (%).....	II.123
Gambar 2.76.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	II.124
Gambar 2.77.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	II.125
Gambar 2.78.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%).....	II.125
Gambar 2.79.	Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Tahun 2016	II.127
Gambar 2.80.	Cakupan Puskesmas per 10.000 Penduduk di Provinsi Papua	II.128
Gambar 2.81.	Rasio Dokter dan Tenaga Medis per 100.000 Penduduk	II.128
Gambar 2.82.	Angka Penderita Malaria di Provinsi Papua Dan Indonesia Tahun 2013-2017	II.129
Gambar 2.83.	Angka Penderita Malaria DI Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun 2013-2017	II.130
Gambar 2.84.	HIV/AIDS di Provinsi Papua (orang).....	II.131
Gambar 2.85.	HIV/AIDS Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016	II.131
Gambar 2.86.	Cakupan Kunjungan K4 di Provinsi Papua	II.133
Gambar 2.87.	Panjang Jalan Provinsi Menurut Jenis Permukaan Tahun 2016	II.134
Gambar 2.88.	Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Papua Tahun 2016 (km).....	II.135
Gambar 2.89.	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	II.136
Gambar 2.90.	Akses terhadap Sarana Pendidikan dan Kesehatan	II.137
Gambar 2.91.	Jumlah Jembatan berdasarkan Kondisi Tahun 2016	II.138
Gambar 2.92.	Penduduk Berakses Air Bersih di Provinsi Papua	II.139
Gambar 2.93.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Provinsi Papua	II.140
Gambar 2.94.	Sumber Air Minum, Mandi, dan Cuci Dominan	II.141
Gambar 2.95.	Persentase Rumah Tangga dengan Jamban Tidak Layak Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2015	II.142
Gambar 2.96.	Kondisi Ketersediaan Infrastruktur Air Limbah Domestik di Provinsi Papua Tahun 2017	II.144
Gambar 2.97.	Kondisi Penanganan Sampah di Provinsi Papua 2013-2018	II.145
Gambar 2.98.	Tempat Buang Sampah Dominan (Kiri); Persentase Sampah yang Dikelola secara Mandiri oleh Masyarakat di Sumber (Kanan)	II.146
Gambar 2.99.	Ketersediaan Infrastruktur Persampahan Domestik Papua	II.147
Gambar 2.100.	Kondisi Rumah Layak Huni di Provinsi Papua.....	II.149
Gambar 2.101.	Kondisi Penyenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua.....	II.150
Gambar 2.102.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua Tahun 2017 (orang)	II.151
Gambar 2.103.	Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja Per Tahun (%).....	II.153

Gambar 2.104.	Kondisi Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja	II.153
Gambar 2.105.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua Tahun 2013-2017.....	II.155
Gambar 2.106.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Papua	II.156
Gambar 2.107.	Jumlah KDRT Provinsi Papua Tahun 2013-2016.....	II.158
Gambar 2.108.	Proporsi Penduduk Di Provinsi Papua dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar = 2.100 Kkal/kapita/hari)	II.158
Gambar 2.109.	Kondisi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	II.163
Gambar 2.110.	Jumlah Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013-2017 (program)	II.164
Gambar 2.111.	Jumlah kelompok PKK dan binaan PKK.....	II.165
Gambar 2.112.	Perkembangan APBK, APBD Provinsi, dan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (Ribu Rupiah)	II.167
Gambar 2.113.	Persentase Dana Desa terhadap APBD Provinsi, Dana Otonomi Khusus, dan APBK di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (%)	II.167
Gambar 2.114.	Persentase APBK terhadap APBD Provinsi, dan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (%)	II.167
Gambar 2.115.	Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga	II.169
Gambar 2.116.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan.....	II.172
Gambar 2.117.	Individu yang Menggunakan Telepon Genggam dan Internet	II.173
Gambar 2.118.	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016	II.174
Gambar 2.119.	Capaian Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga.....	II.177
Gambar 2.120.	Tingkat Apresiasi Seni dan Budaya Daerah di Kalangan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta.....	II.182
Gambar 2.121.	Kondisi Perpustakaan di Provinsi Papua.....	II.182
Gambar 2.122.	Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku	II.183
Gambar 2.123.	Jumlah Objek Wisata dan Kunjungan Tamu di Provinsi Papua	II.184
Gambar 2.124.	Jumlah Tamu WNA dan WNI Tahun 2016 (orang)	II.185
Gambar 2.125.	Distribusi Penyebaran Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Papua Tahun 2016.....	II.188
Gambar 2.126.	Jumlah Cadangan (<i>Reserve</i>) yang Terdata dan Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Batubara di Provinsi Papua	II.190
Gambar 2.127.	Potensi dan Jumlah Cadangan Tembaga dan Emas yang Sudah Diketahui (Juta Ton Bijih)	II.190
Gambar 2.128.	Total Produksi Tembaga dan Emas (Juta Ton Bijih)	II.191
Gambar 2.129.	Kondisi Perindustrian di Provinsi Papua.....	II.196
Gambar 2.130.	Mekanisme Hubungan Gubernur, DPRP dan MRP	II.204
Gambar 2.131.	Alokasi Dana Otsus Provinsi Papua Tahun 2002-2016	II.210
Gambar 2.132.	Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Papua dan Indonesia	II.211

Gambar 2.133.	Struktur Ekonomi Provinsi Papua Tahun 1995-2017 (%)	II.213
Gambar 2.134.	Jumlah Orang Bekerja dan Tingkat Pengangguran di Papua	II.215
Gambar 2.135.	IPM di Provinsi Papua dan Indonesia.....	II.216
Gambar 2.136.	Gambar Peta kualitas daya dukung penyediaan pangan Provinsi Papua	II.221
Gambar 2.137.	Urutan daya dukung dalam penyediaan pangan per kabupaten	II.223
Gambar 2.138.	Peta daya dukung penyediaan pangan per-wilayah budaya.....	II.224
Gambar 2.139.	Peta Kebutuhan Energi Pangan Per Kabupaten	II.225
Gambar 2.140.	Peta Ketersediaan Energi Pangan Per Kabupaten.....	II.226
Gambar 2.141.	Peta Keseimbangan Ketersediaan dan Kebutuhan Energi Pangan	II.227
Gambar 2.142.	Proyeksi Kebutuhan Pangan.....	II.229
Gambar 2.143.	Proyeksi Kehilangan Tanah.....	II.230
Gambar 2.144.	Peta kualitas daya dukung penyediaan air Provinsi Papua	II.232
Gambar 2.145.	Urutan daya dukung penyediaan air per Kabupaten	II.233
Gambar 2.146.	Peta daya dukung penyediaan air per-wilayah budaya.....	II.235
Gambar 2.147.	Peta Daya Tampung Pemurnian Air	II.236
Gambar 2.148.	Urutan daya tampung dalam pemurnian air per kabupaten.....	II.238
Gambar 2.149.	Peta daya tampung pemurnian air berdasarkan wilayah budaya.....	II.239
Gambar 2.150.	Peta Ketersediaan Air Per Kabupaten.....	II.241
Gambar 2.151.	Peta Kebutuhan Air Bersih Per Kabupaten.....	II.242
Gambar 2.152.	Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Air.....	II.244
Gambar 2.153.	Pola Ruang Wilayah Sebagai Dasar Analisi Luas Guna Lahan	II.245
Gambar 2.154.	Perubahan Tutupan/Penggunaan Lahan 1990-2010 dan Proyeksi Tahun 2020-2030.....	II.247
Gambar 2.155.	Ketercapaian Indikator Papua terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional	II.249
Gambar 2.156.	Gambar 2. Indikator TPB yang Dilaksanakan di Provinsi Papua	II.250
Gambar 2.157.	Ketercapaian Indikator TPB di Provinsi Papua	II.252
Gambar 2.158.	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sudah Tercapai ..	II.255
Gambar 2.159.	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Belum Tercapai..	II.262
Gambar 2.160.	Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan/atau Tidak Ada Data	II.271
Gambar 3.1.	Garfik Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2017	III.3
Gambar 3.2	Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2013-2017	III.6
Gambar 3.3	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017	III.8
Gambar 3.4	Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017	III.11
Gambar 3.5	Penerimaan Dana Otsus Periode 2013-2017	III.14

Gambar 3.6.	Skema Sumber Dana Dan Pembagian Dana Otsus Provinsi Papua Tahun 2013-2017	III.15
Gambar 5.1.	Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang.....	V.2
Gambar 6.1.	Grand Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023	VI.2
Gambar 6.2	Pendekatan Pembangunan Daerah	VI 6
Gambar 6.3.	Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023	VI 7
Gambar 6.4.	Ilustrasi Kerangka Pengembangan Wilayah Provinsi Papua.....	VI 27
Gambar 6.5.	Ilustrasi Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Provinsi Papua	VI 31
Gambar 6.6.	Ilustrasi Pengembangan Klaster Ekonomi di Papua.....	VI 36
Gambar 6.7.	Ilustrasi Pengembangan Klaster Ekonomi di Papua	VI 38
Gambar 6.8.	Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Mamta	VI 39
Gambar 6.9.	Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Saereri	VI 40
Gambar 6.10.	Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Mee Pago	VI 41
Gambar 6.11.	Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat La Pago	VI 43
Gambar 6.12.	Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Anim Ha	VI 44
Gambar 6.13.	Ilustrasi Implementasi Janji/Program Prioritas Kepala Daerah.....	VI 47